



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UMKM TIDAK
MENERAPKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN
SAK ETAP
(STUDI KASUS PADA DUSUN KEREP, KELURAHAN PANJANG,
KECAMATAN AMBARAWA)**

Melinda Dwi Lestari *

Universitas PGRI Yogyakarta

*email: melindadwi.0531@gmail.com

ABSTRACT

Knowledge of the preparation of financial reports according to accounting standards is very important for SMEs. This research was conducted to determine the condition of SMEs in the area; knowing the factors that influence business actors not to apply accounting depreciation, knowing what obstacles will be experienced when applying these compilations. This study used a qualitative approach with SMEs Kerep Hamlet, Panjang Village, Ambarawa District, Semarang Regency as a research medium. The way the data is collected is by interview and observation. The result of this study indicates that SMEs in these areas have not implemented the preparation of reports according to existing standards. They think that it will be complicated if implemented. Business actors say that their average education is low and there is now socialization from the government which is also an obstacle in preparing standardized accounting reports. Apart from that, the perpetrators also did not take full advantage of the technology, which was also a trigger for SMEs Kerep Village to not implement financial reporting according to SAK ETAP.

INFO ARTIKEL

Diterima: 25 Desember 2020

Direview: 18 Januari 2021

Disetujui: 5 Maret 2021

Terbit: 30 Juni 2021

Keywords:

preparation of financial reports, SMEs, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha perdagangan yang memiliki anggota banyak dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kedudukan yang sangat berarti terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM dijadikan sebagai sektor penyedia lapangan pekerjaan terbanyak dengan modal yang kecil sehingga masyarakat menengah kebawah dapat berinvestasi. Bersumber pada informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2018 kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2018 mencapai 61,07 persen menuju 70 persen. Dari jumlah tersebut, sektor mikro menyumbangkan 37,77 persen, (www.depkop.go.id). Pada tahun 2017 jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia mencapai 62,92 juta unit usaha yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara.

Pada dasarnya UMKM mempunyai peluang yang sangat besar di dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah baik itu daerah atau pusat. Pemerintah dalam pendanaan untuk mengembangkan

para pelaku usaha di salurkan melalui sebagian program diantaranya KUR dan UMI. Dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM

Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi” yang mengutip dari buku (Basri dan Nugroho, 2009) menyatakan dengan terdapatnya KUR diharapkan para pelaku usaha memperoleh solusi untuk bantuan modal dengan sistem perbankan sebab banyaknya hambatan yang dirasakan dalam memperoleh dana untuk memajukan usahanya. Pada prakteknya realisasi KUR ini jauh dari sasaran karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur masih berhati-hati dalam penyaluran kredit. Terkait dengan para pelaku UMKM tidak mampu memberikan informasi mengenai keadaan usahanya sehingga membuat informasi bulletin tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006).

Tidak hanya itu, tak sedikit pula para pelaku UMKM merasa kesusahan di dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan mengenai SAK. Satyo (2005) pula berkomentar bahwa hal ini dapat terjadi karena tidak adanya peraturan yang mengharuskan para pelaku dalam penyusunan laporan keuangan. Sampai saat ini banyak keuangan di UMKM yang mengalami ketidakjelasan karena kondisi pembukuan yang kacau. Oleh karena itu, pemerintah harus turun tangan untuk menanggulangi permasalahan ini dan konsistensi dalam SAK juga terwujud.

Sebenarnya Dewan Standar Akuntansi (DSAK) pada tahun 2009 telah meresmikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP berlaku efisien pada 1 Februari 2011 tetapi penerapannya lebih dini pada 1 Januari 2011. SAK ETAP bertujuan untuk menghasilkan fleksibilitas serta memudahkan para pelaku usaha dalam mendapatkan bantuan dana. Perihal ini diterapkan pada entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas dan membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk universal (IAI, 2016).

Dusun Kerep Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dikenal sebagai daerah yang mayoritas penduduknya merupakan pelaku UMKM. Daerah ini memiliki wisata tempat doa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan ke Negara Tetangga. Di desa ini juga didukung dengan keadaan alam yang sangat sejuk dan indah sehingga memanjakan mata pengunjung. Dari situlah masyarakat yang dulunya bekerja sebagai pegawai pabrik kini bergeser ke usaha rumah tangga sampai ke industri menengah. Entah itu sebagai pemilik usaha ataupun hanya sebagai karyawan. Tak sedikit masyarakat sekitar juga mulai memproduksi barang-barang bahkan makanan untuk menaikkan pendapatan mereka.

Semakin kesini semakin banyak pula permintaan akan produk-produk lokal itu meskipun itu semua bukan asli dari daerah situ melainkan juga daerah sekitar wisata tersebut. Disisi lain UMKM di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan suntikan dana. Biasanya perbankan mau memberikan bantuan modal apabila UMKM tersebut telah berkembang dengan baik dan memiliki pembukuan yang jelas. Maka dari itu, tak sedikit pelaku UMKM melakukan peminjaman kepada bank-bank secara mandiri untuk menguatkan modal mereka. Jika melalui perbankan yang disediakan UMKM mereka tidak bisa karena hanya beberapa orang yang melakukan pembukuan itupun hanya sederhana dan tidak sesuai standar.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) (Kurniawansyah, 2016)mengetahui kondisi UMKM di Dusun tersebut; (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku UMKM tidak melakukan penyusunan keuangan sesuai standar; (3) mengetahui kendala apa yang dialami apabila menetapkan SAK ETAP; dan (4) mengetahui bagaimana kemajuan UMKM tersebut bila menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dimaksudkan untuk

digunakan untuk entitas usaha tanpa akuntabilitas publik dengan penerbitan laporan keuangan yang umum untuk pengguna eksternal (IAI, 2016). Pelaksanaan SAK ETAP bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha kecil dan menengah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang ada. Sehingga para pelaku UMKM merasa mudah, sederhana serta merasa tidak terbebani akan aturan yang ada.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Bersumber dari pendapat Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM dikelompokkan kedalam empat sektor yaitu rumah tangga serta sebagian jenis industri yang ada (Budiarto Rachmawan, dkk, 2015). Undang- Undang nomor 9 tahun 1995 usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. Sedangkan usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil. Menurut Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 5 ayat (1) kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan
- e. Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- f. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Laporan Keuangan

Menurut IAI pada ED SAK ETAP (2016) tujuan laporan keuangan adalah untuk membuat laporan keuangan yang berguna untuk kebutuhan informasi pengguna eksternal. Sedangkan menurut IAI bersumber pada PSAK I laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan secara terstruktur dan sesuai dengan entitas keuangan yang ada. Komponen laporan keuangan tersebut meliputi laporan laba- rugi, arus kas, ekuitas, liabilitas serta pendapatan dan beban yang tercantum didalamnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cenderung menggunakan analisis dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif ini berbeda dengan kuantitatif, metode ini biasanya dilakukan apabila jumlah narasumber terbatas. Dengan menggunakan populasi UMKM Dusun Kerep Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan sampel para pekerja dan pemilik usaha di sekitar tempat tersebut. Teknik pengumpulan informasi yang digunakan ialah dengan metode wawancara dan observasi. Dengan metode observasi data yang didapatkan lebih tepat, akurat, bersifat objektif dan data yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan. Metode wawancara dipilih karena untuk melengkapi data yang didapatkan dari metode observasi serta untuk mendapatkan informasi utama dari orang pertama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Menurut Denzin (1970) triangulasi data dapat menyelamatkan dari prasangka yang bersumber dari sumber, teori, peneliti tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan memperoleh data bahwa narasumber memberikan diskripsi sebagai berikut. Sebagian besar para pelaku UMKM di tempat tersebut merupakan rumah tangga dan industri kecil namun tak memungkiri juga adanya industri menengah. Jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM juga masih rendah dengan perbandingan jenjang SD dengan SMA atau yang lebih tinggi sekitar 10:3. Tidak hanya itu, UMKM di daerah tersebut rata- rata dijalankan oleh karyawannya dan pemilik usaha hanya ikut terjun di dalamnya sekitar 40% dan sang

karyawan 60%. Narasumber juga ada yang berpendapat bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP menurutnya membingungkan.

Narasumber pula mengatakan apabila SAK ETAP akan diterapkan mungkin mereka akan sedikit hadapi hambatan di dalam pemahaman dan penerapannya melihat latar belakang jenjang pendidikan mereka. Namun tak menutup kemungkinan apabila UMKM di daerah tersebut benar-benar mempraktikkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP akan menjadikannya lebih maju karena mendapatkan suntikan dana dari perbankan yang ditunjuk pemerintah.

Para narasumber menyadari akan pentingnya pengetahuan akuntansi di dalam menyusun laporan keuangan. Sesuai dengan penelitian Evi Linawati (2015) kalau pengetahuan akuntansi sangat pengaruhi mutu laporan keuangan yang disusun oleh pelaku usaha tersebut.

Walaupun demikian, dengan kesadaran tersebut para pelaku UMKM belum pula mempraktikkan penyusunan laporan keuangan dengan berbagai alasan. UMKM di Dusun Kerep memiliki berbagai pendapat antara lain:

- a. Pelaku UMKM tidak begitu membutuhkan pengetahuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka dapat melakukan pencatatan dengan metode yang sederhana dan dapat dipahami. Pada dasarnya yang mereka catat selama ini hanyalah piutang dagang serta modal yang digunakan.
- b. Pencatatan akuntansi dianggap sebagai beban tersendiri oleh pelaku UMKM karena mereka menganggap hal itu rumit dan membingungkan. Di lain itu, apabila ini diterapkan mereka juga harus meluangkan waktu yang lebih untuk menyusun laporan keuangan.
- c. Rata-rata latar belakang pendidikan yang tidak begitu tinggi membuat para pelaku UMKM enggan mempraktikkan pencatatan akuntansi karena mereka takut tidak dapat menyusunnya. Selain itu, tidak adanya sosialisasi mengenai bagaimana metode penyusunan yang sesuai akuntansi membuat mereka enggan mempraktikkannya.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa keadaan UMKM di daerah tersebut sebenarnya sudah berjalan baik. Hanya saja di dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang belum diterapkan. Meskipun ada pemilik usaha yang hanya menuliskan di dalam pembukuan berupa piutang dagang dan pemasukan sehari-hari. Selebihnya mereka tidak melakukan apapun bahkan ada beberapa usaha rumah tangga yang tidak memiliki laporan keuangan. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini selagi tidak mempengaruhi keberlangsungan usahanya.

Ada sebagian kasus yang sering dialami oleh pelaku UMKM di daerah tersebut, antara lain: (1) rata-rata karyawan yang bekerja di tempat tersebut kurang begitu menggunakan kecanggihan gadget untuk mencari tahu informasi mengenai akuntansi

(2) kesusahan mendapatkan bantuan tambahan modal disebabkan para pengusaha tidak mempunyai pembukuan yang jelas (3) tingkat pendidikan yang dimiliki karyawan rendah serta motivasi yang dimiliki untuk maju rendah.

Secara umum UMKM di Dusun Kerep Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang belum mempraktikkan penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang ada. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai standar penyusunan laporan keuangan kepada para pelaku UMKM. Ada sebagian aspek yang melatarbelakangi hal tersebut. Minimnya pengetahuan akuntansi dari pemilik dan karyawan menjadi salah satu pemicu tidak diterapkannya pembukuan yang baik. Tidak adanya sosialisasi mengenai apa itu pencatatan akuntansi dan bagaimana menerapkannya dalam usaha mereka juga menjadi salah satu faktornya. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurkholik, M.L Amalia (2019) yang mengatakan bahwa pemberian informasi serta sosialisasi tentang pembukuan akuntansi bisa pengaruhi pembukuan pada UMKM.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian R.V Safitri, Syarifudin (2018) yang menyimpulkan bahwa pencatatan akuntansi yang sesuai standar dapat menolong para pelaku usaha di dalam mendapatkan pinjaman bantuan modal di perbankan. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa penyusunan

laporan keuangan yang jelas dapat memudahkan bagi pihak bank untuk memastikan mengambil keputusan dan peminjaman kredit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi Meutia (2010) yang menyimpulkan bahwa kompetensi wirausaha sangat pengaruhi tingkatan serta sikap wirausaha dalam berbuat sesuatu. Dimana seluruh hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat pengaruh antara kompetensi dan pengetahuan akuntansi pemilik usaha atau karyawan UMKM terhadap informasi mengenai akuntansi (Deddy Kurniawansyah, 2016, p.838-839). Oleh sebab itu, UMKM di daerah Kerep belum bisa menerapkan pembukuan akuntansi dengan baik karena pengetahuan yang didapat mengenai hal itu masih sedikit.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pendidikan mempengaruhi kualitas pencatatan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Semakin tinggi kualitas pendidikan maka kemampuan di dalam menyusun pembukuan akuntansi juga semakin baik pula. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh E. A Soraya, A. Mahmud (2016) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pengusaha maka semakin tinggi pula kebutuhan SAK ETAP. Dapat dikatakan bahwa salah satu faktor para pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan dengan baik sesuai standar akuntansi adalah karena para pelakunya didominasi oleh usaha kecil dan mikro (Deddy Kurniawansyah, 2016, p.839).

KESIMPULAN

Pandangan para pelaku usaha di dusun Kerep Kelurahan Panjang mengenai berartinya penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, antara lain: para pelaku UMKM berpikiran kalau penyusunan laporan keuangan susah diterapkan di dalam usahanya. Mereka beranggapan dengan adanya penerapan ini akan memakan waktu lama dan juga tenaga.

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP belum diterapkan dalam UMKM ini sebab pengetahuan serta tingkat pendidikan para pelaku usaha mengenai hal ini masih sangat rendah. Sehingga tidak memungkinkan untuk menerapkan penyusunan laporan keuangan bahkan secara sederhana pun.

Tidak adanya sosialisasi mengenai tata cara penerapan yang sesuai standar dari pihak pemerintah. Minimnya pemanfaatan teknologi untuk mencari informasi mengenai penyusunan sesuai standar akuntansi. Hal itu karena dari pihak pemerintahnya sendiri kurang begitu optimal untuk menerapkannya

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sedikitnya narasumber dikarenakan kondisi pandemik sehingga data yang didapat kurang begitu memuaskan.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan saat semua kembali normal atau dengan tambahan teknik penelitian lainnya seperti Focus Group Discussion (FGD).

REFERENSI

- Amri, N. F. (2019, September 9). *e-Akuntansi*. Retrieved from e-akuntansi.com: <https://www.e-akuntansi.com/saketap/#:~:text=SAK%20ETAP%20adalah%20Standar%20Akuntansi,memperj%20ualbelikan%20sahamnya%20di%20pasar%20modal>.
- Elyana Ayu Soraya, A. M. (2016). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 5 No. 1. Pp. 1-8.
- Evi Linawati, M. M. (2015). Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Penggunaan Informasi Akuntansi. *Conference in Business, Accounting, and Management*, Vol. 2 No. 1. Pp. 145-149.
- Hetika, N. M. (2017). Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 5, No. 2. Pp. 259-

266.

- IAI. (2016). *Ikatan Akuntan Indonesia*. Retrieved from iaiglobal.or.id: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap#>
- IAI. (2016). *Ikatan Akuntan Indonesia*. Retrieved from iaiglobal.or.id: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap>
- IkaCahyani, B. (2020, Mei 15). *kompasiana*. Retrieved from kompasiana.com: <https://www.e-akuntansi.com/sak-etap/>
- Kurniawansyah, D. (2016). Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, Pp. 832-841.
- Meutia. (2010). Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Melalui Kompetensi Kewirausahaan dan Modal Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Tirtayasa Ekonomi*, Vol. 5. No. 2. Pp. 167-174.
- Nurkholik, M. L. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUKUAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Volume 6 No. 2. Pp. 55-65.
- Rachmawan Budiarto, S. H. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rosita Vega Savitri, S. (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 5 No.2. Pp.117-125.
- Satyo. (2005). UKM dan Kebutuhan Standar. *Media Akuntansi*, Vol. 7. No. 4. Pp. 1-22.
- Schrooten, T. B. (2006). Relationship Banking and SMEs A Theoretical Analysis. *Small Business Economic*, Vol. 25. No.2. Pp. 26-51.
- Tani, F. (2015, April 8). *Kompasiana*. Retrieved from Kompasiana.com: <http://https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5535a2946ea8347510da42d9/penelitian-kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data>
- Undang Undang Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, *Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil*, 1995/1996. www.depkop.go.id.
- Yuli Setyawati, S. H. (2018). PERSEPSI PEMILIK DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3. No.2. Pp. 161-204.